



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Jalan. APT. Pranoto 3 Tanjung Redeb – Berau

2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu pada Bidang komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai Organisasi Perangkat (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Berau.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan.

Untuk tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan daerah disusun atas program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Berau 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian.

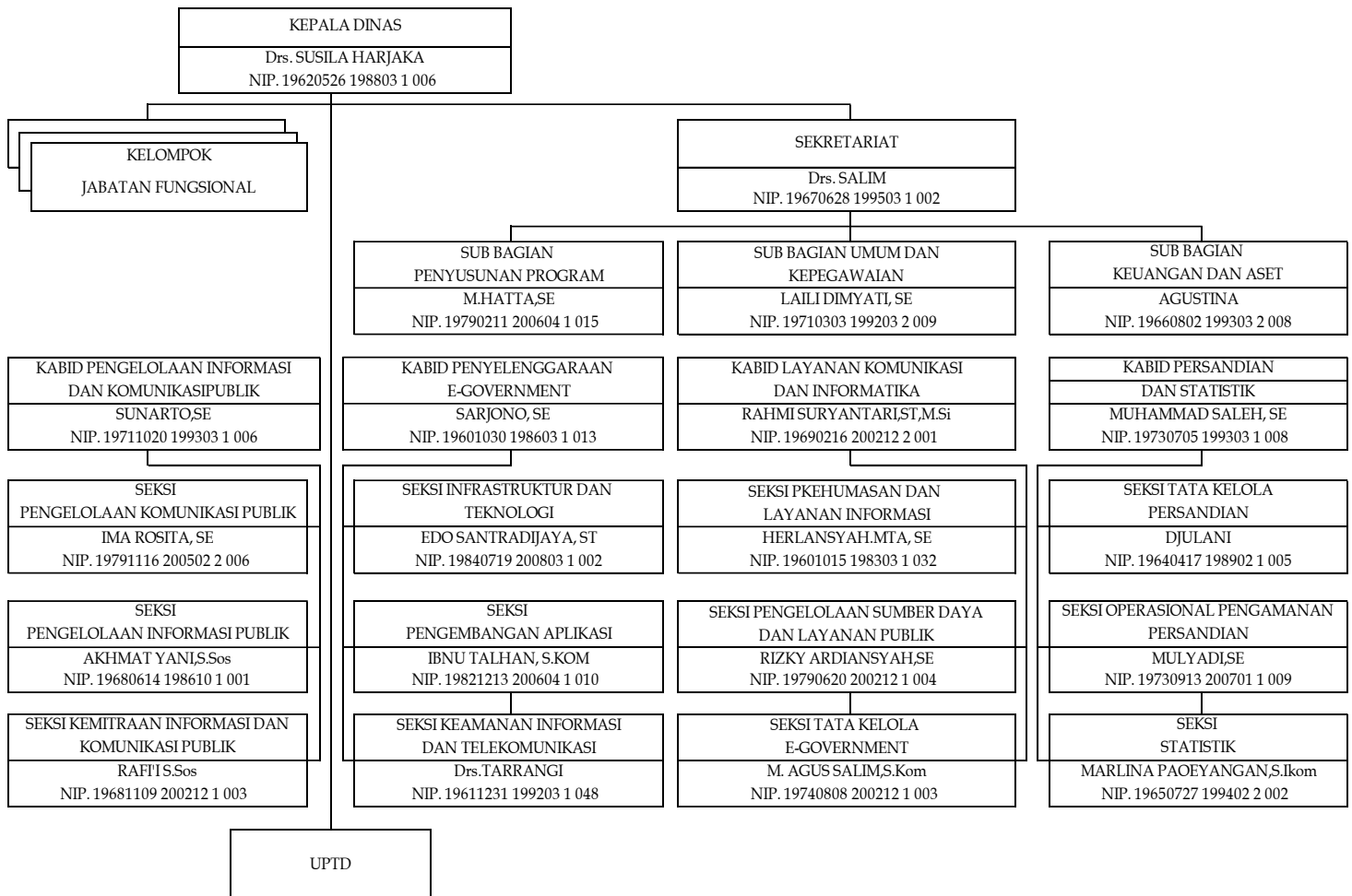
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Adapun nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Urusan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan Urusan Statistik Sektorial, hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
5. Berikut ini disajikan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Berau per tanggal 31 Desember 2017 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Berau.

6. Aparatur sipil negara yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 39 orang yang dapat digambarkan dalam Daftar Urut Kependidikan (DUK) per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN / LEMBAGA / DAERAH / TINGKAT
 KABUPATEN BERAU

Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika

Bulan 30 Desember 2017

No	NAMA	NIP	TMT	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN				TGL LHR	USIA	DATA LAIN-LAIN			
				Gol Ruang	TMT	NAMA	TMT	ESE	Tahun	Bulan	Nama	Bulan dan Tahun	Jam	Nama	Jurusan	Lulus Tahun	Gelar			Tk. Ijazah	TMP LAHIR	L/P	AGAMA
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22
1	Drs. SUSILA HARJAKA	19620526 198803 1006	01-03-1988	IV/c	01-04-2014	KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	04-01-2017	II.B	29	6	DIKLAT PIM TK	2013	SARJANA	PDU/EK.KOP	1986	Drs	S 1	26-05-1962	56	SLEMAN	L	ISLAM	
2	Drs. SALIM	19670628 199503 1002	01-03-1995	IV/b	01-10-2014	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	04-01-2017	III.A	22	6	DIKLAT PIM TK	2016	SARJANA	SOSPOL SOSIATRI	1992	Drs	S 1	28-06-1967	51	BERAU	L	ISLAM	
3	SARJONO, SE	19601030 198603 1013	01-03-1986	IV/a	01-04-2016	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	04-01-2017	III.B	31	6	DIKLAT PIM TK	2016	SARJANA	MANAJEMEN	1997	SE	S 1	30-10-1960	58	SRAGEN	L	ISLAM	
4	RAHMI SURYANTARI, ST. M.	19690216 200212 200	24-12-2002	IV/a	01-10-2016	KEPALA BIDANG LAYANAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	03-01-2017	III.B	14	9	DIKLAT PIM TK	2017	PASKA SARJANA	MAGISTER ILMUEKONOMI	2013	SE, Msi	S2	16-02-1969	49	PATI	P	ISLAM	
5	HERLANSYAH, MTA, SE	19601015 198303 1032	01-03-1983	III/d	01-10-2005	KASIKEHUMASAN DAN LAYANAN INFORMASI	05-10-2017	IV.A	34	6	DIKLAT PIM TK	2009	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2001	SE	S1	15-10-1960	58	ANJUNGREDE	L	ISLAM	
6	Drs. TARRANGI	19611231 199203 1048	01-03-1992	III/d	01-04-2006	KASIKEMAMANAN INFORMASIDAN TELEKOMUNIKASI	05-10-2017	IV.A	25	6	DIKLAT PIM IV	2003	285	SARJANA	SOSPOL	1987	Drs	S 1	31-12-1961	57	APIENREKAN	L	ISLAM
7	SUNARTO, SE	19711020 199203 1006	01-03-1993	III/d	01-04-2011	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK	05-10-2017	III.B	24	6	DIKLAT PIM TK	2011	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2000	SE	S 1	20-10-1971	47	BERAU	L	ISLAM	
8	MUHAMMAD SALEH, SE	19730705 199303 1008	01-03-1993	III/d	01-10-2012	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	04-01-2017	III.B	24	6	DIKLAT PIM TK	2004	240	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2001	SE	S 1	05-07-1973	45	ANJUNGREDE	L	ISLAM

9	AKHMAT YANI, S.Sos	19680614 198610 1001	01-10-1986	III/d	01-10-2012	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASIPUBLIK	12-01-2017	IV.A	31	10	DIKLAT PIM IV	2003	285	SARJANA	MANAGEMENT PEMBANGUNAN DAERAH	2000	S.Sos	S 1	14-6-1968	50	ANJUNGREDE	L	ISLAM
10	DJULANI	19640417 198902 1005	01-02-1989	III/d	01-04-2014	KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	04-01-2017	IV.A	28	7	DIKLAT ADUM I	1998		STM	MESIN	1985			17-4-1964	54	JMBER PUCUN	L	ISLAM
11	AGUSTINA	19660802 199303 2 006	01-03-1993	III/d	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	12-01-2017	IV.A	24	6	DIKLAT ADUM V	1999	250	DIPLOMA 3	MANAGEMENT PERPAJAKAN	1988		D3	08/02/1966	52	TIKALA	P	PROTESTAN
12	Hj. LAILI DIMYATI, SE	19710303 199203 2 009	01-03-1992	III/d	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	05-10-2017	IV.A	25	6	DIKLAT PIM TK	2013	285	SARJANA	MANAGEMENT	2001	SE	S 1	3-3-1971	47	SAMBALIUNG	P	ISLAM
13	M. AGUS SALIM, S.Kom	19740808 200212 1003	01-12-2002	III/d	01-04-2015	KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	12-01-2017	IV.A	14	10	DIKLAT PIM TK	2012	285	SARJANA	TEKNIK INFORMATIKA	2000	S.Kom	S 1	8-8-1974	44	BERAU	L	ISLAM
14	RIZKY ARDIANSYAH, SE	19790620 200212 1004	01-12-2002	III/d	01-04-2015	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LAYANAN PUBLIK	05-10-2017	IV.A	14	9	DIKLAT PIM TK	DES 2012	285	SARJANA	EKONOMI PEMBANGUNAN	2001	SE	S 1	20-06-1979	39	BERAU	L	ISLAM
15	RAFI, S.Sos	19681109 200212 1003	01-12-2002	III/d	01-04-2015	KEPALA SEKSI KEMITRAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK	12-01-2017	IV.A	14	10	DIKLAT PIM TK	2014		SARJANA	ILMU JURNALISTIK	1995	S.Sos	S 1	9-11-1968	50	BERAU	L	ISLAM
16	IMA ROSITA, SE	19791116 200502 2 006	01-02-2005	III/c	01-04-2013	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASIPUBLIK	12-01-2017	IV.A	12	7	DIKLAT PIM TK	2014		SARJANA	AKUNTANSI	2002	SE	S 1	16-11-1979	39	SAMARINDA	P	ISLAM
17	MARLINA PAOEYANGAN, S.	19650727 199402 2 002	01-02-1994	III/c	01-04-2014	KEPALA SEKSI STATISTIK	05-10-2017	IV.A	23	7				SARJANA	ILMU KOMUNIKASI	2006	S.Iko	S 1	27-07-1965	53	BALIKPAPAN	P	PROTESTAN

18	IBNU TALHAH, S.Kom	19821213 200604 1010	01-04-2006	III/c	01-04-2014	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	12-01-2017	IV.A	8	5	DIKLAT PIM TK	2015	240	SARJANA	TEKNIK KOMPUTER	S.Kom	S1	13-12-1982	36	SURABAYA	L	ISLAM	
19	MULYADI, SE	19730913 2007011009	01-01-2007	III/c	01-04-2015	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	05-10-2017	IV.A	10	8			216	SARJANA	EKONOMI PENGANGUNAN	2001	SE	S1	13-09-1973	45	UNUNG TABU	L	ISLAM
20	EDO SANTRADIJAYA, ST	19840719 200803 1002	01-03-2008	III/c	10-04-2016	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	05-10-2017	IV.A	9	6				SARJANA	TEKNIK INFORMATIKA	2005	ST	S1	19-07-1984	34	SAMARINDA	L	ISLAM
21	IRWAN SAPUTRA, S.KOM	19821220 200904 1003	01-04-2009	III/b	01-04-2013	PELAKSANA			8	5	DIKLAT PRAJA		135	SARJANA	KOMPUTER	2007	S.KOM	S1	20-12-1982	36	BERAU	L	ISLAM
22	M. HATTA SE, MM	19790211200604 1015	01-04-2006	III/b	01-04-2014	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	05-10-2017	IV.A	11	5				PASCA SARJANA	MAGISTER MANAGEMEN	2011	SE, MM	S2	11-02-1979	39	BERAU	L	ISLAM
23	MARGIONO, SE	1980108 2007011007	01-01-2007	III/a	01-10-2014	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJA	AGUS TUS 2008	174	SARJANA	EKONOMI PENGANGUNAN	2006	SE	S1	08-11-1980	38	BATANG	L	ISLAM
24	SUSILOWATI, SE	19740312 2007012 020	01-01-2007	III/a	01-01-2014	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJA	NOP 2010	174	SARJANA	EKONOMI PENGANGUNAN	2006	SE	S1	12-03-1974	44	BERAU	P	ISLAM
25	AGRIYANTO	19600117 198803 1005	01-03-1988	III/a	01-10-2016	PELAKSANA			29	6				SM A					17-01-1960	58	ANJUNG REDE	L	ISLAM
26	SYARIFUDDIN NUR, A MD	197706212008011018	01-01-2008	III/a	01-04-2016	PELAKSANA			9	8	DIKLAT PRAJAB II			DIPLO MA 2		AMD	D2	21-06-1977	41	BERAU	L	ISLAM	
27	FARIZDANIANSYAH SAPUTRO, S.STP	19940223201609 1001	01-09-2016	III/a	01-10-2017	PELAKSANA			1	10	DIKLAT PRAJA	2017		SARJANA	Politik Pemerintahan	2016	S.STP	D4	23-02-1994	24	KUDUS	L	ISLAM
28	EDWIN HELDY	19731023 199803 1004	01-03-1998	II/d	01-04-2010	PELAKSANA			19	6	DIKLAT PRAJA	JUNI 1998		SM A		1992			23-10-1973	45	BERAU	L	ISLAM
29	ABDUL WAHAB SYAKHRANI	19680327 2007011017	01-01-2007	II/c	01-04-2014	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJA	AGS 2008	174	SM A					27-03-1968	50	BANJARMASIN	L	ISLAM

30	ERNA NINGSIH	198012112007012 010	01-01-2007	II/c	01-04-2015	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJA	NOP 2008	174	SMA		2000			11-12-1980	38	BERAU	P	ISLAM
31	LECHI FANITA	19770328 2008012 011	01-01-2008	II/c	01-01-2016	PELAKSANA			9	8	DIKLAT PRAJA	JULI 2009	174	SMA		1996			28-03-1977	41	BERAU	P	ISLAM
32	YUNAN JUNAIDI	19770628 2008011018	01-01-2008	II/c	01-04-2016	PELAKSANA			9	8	DIKLAT PRAJA	JULI 2009	174	STM		1996			28-06-1977	41	JAMBI	L	ISLAM
33	M. ZAKIRULLAH ISHAK	19730830 2009011006	01-01-2009	II/b	01-04-2013	PELAKSANA			8	8				SMEA					30-08-1973	45	SAMARINDA	L	ISLAM
34	ISHAK	19821019 2009011008	01-01-2009	II/b	01-04-2013	PELAKSANA			8	8	DIKLAT PRAJA	NOP 2010		SMK	TRIK PEMAKAIA	2000			19-10-1982	36	BERAU	L	ISLAM
35	AGUS PADLI	19780808 200502 1004	01-02-2005	II/b	01-04-2014	PELAKSANA			12	7				MADR ASAH ALIYAH		1997			08-08-1978	40	BERAU	L	ISLAM
36	NURYONO	19820114 2010011016	01-01-2010	II/b	01-04-2014	PELAKSANA			7	8				SMA					14-10-1982	36	BERAU	P	ISLAM
37	RAMLAH	19840610 2010012 038	01-01-2010	II/b	01-04-2014	PELAKSANA			7	8	DIKLAT PRAJA	APRIL 2010	174	SMK	AKUNTANSI	2002			10-06-1984	34	SAMARINDA	P	ISLAM
38	RIRIN WULANDARI	19850404 2010012 036	01-01-2010	II/b	01-04-2014	PELAKSANA			7	8	DIKLAT PRAJA	APRIL 2010	174	SMA	IPS	2003			04-04-1985	33	BERAU	P	ISLAM
39	KEMANTO	19661217 2007011013	01-01-2007	II/b	01-04-2016	PELAKSANA			10	8	DIKLAT PRAJA	NOP 2008	178	PAKET C		2008			17-12-1966	52	ARANG ANYA	L	ISLAM

Tanjung Redeb, 31 Desember 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. Susila Harijaka
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620526 198803 1 006

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Adapaun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Program dan kegiatan untuk tahun 2017 dapat digambarkan pada table halamanberikut :

Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Thn. 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
a	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp 1.500.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Rp 73.700.000
c	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 69.000.000
d	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Rp 120.831.000
e	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Rp 37.300.000
f	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 10.000.000
g	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 29.203.200
h	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.000.000
i	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 5.000.000
j	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 45.000.000
k	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 5.000.000
L	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 7.000.000
m	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 25.000.000
n	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 175.500.000
o	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 30.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Paratur	
a.	Pemeliharaan peralatan dan jaringan	Rp 155.667.000
3	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	
a	Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi	Rp 245.000.000
b	Penyediaan dan Pengeloalaan internet	Rp 447.145.000
c	Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Rp 210.000.000
4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	
a	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Rp 385.692.000
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
a	Peningkatan Insfrastruktur jaringan relematika	Rp 109.076.000

2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sehingga dapat mengetahui apakah suatu tujuan, sasaran, program dan kegiatan itu berhasil atau tidak. Dalam hal ini setiap tahun dilakukan evaluasi oleh inspektorat. adapun dari anggaran di dinas kominfo Tahun 2017 sebesar Rp. 6.315.964.200,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.122.350.00,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.193.614.200,- dengan realisasidengan hasil capaian kinerja hasil evaluasi oleh inspektorat mendapatkan predikat atau nilai sebesar.....(yg dimasukkan hasil evaluasi 2016 dan untuk 2017 diberi ket belum dilaksanakan evaluasi oleh inspektorat sehingga blm ada nilai)

- Program Peningkatan sarana dan prasarana terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu pemeliharaan peralatan dan jaringan dengan rincian anggaran Rp. 155.667.000,- Pemeliharaan peralatan dan jaringan disini berupa pemeliharaan tower di kampung Merasa kecamatan kelay. Adapun rinciannya sebagai berikut belanja pegawai sebesar Rp. 28.409.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 115.710.000,- realisasi keuangan mencapai Rp. 144.119.000,- sehingga jika di ukur dengan persentase capaiannya sebesar 92,58 %.
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pada program ini terdapat tiga (3) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Pada kegiatan ini terdapat anggaran sebesar *Rp. 245.000.000,-* dengan rincian belanja pegawai sebesar *Rp. 5.976.000,-* dan belanja barang dan jasa sebesar *Rp. 972.000,-* belanja modal sebesar *Rp. 225.600.000,-* sehingga total belanja sebesar *Rp. 232.548.000,-* jika digambarkan dalam persentase adalah sebesar *94,92 %*.
 2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Internet
Pada kegiatan ini terdapat anggaran sebesar *Rp. 447.145.000,-* dengan rincian belanja pegawai sebesar *Rp. 30.975.000,-* belanja barang dan jasa sebesar *Rp. 390.699.496,-* sehingga total belanja pada kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 421.674.496,-* dengan tingkat capaian sebesar *94,30 %*.
 3. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian
Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar *Rp. 210.000.000,-* dengan rincian belanja pegawai sebesar *Rp. 139.116.000,-* belanja barang dan jasa sebesar *Rp. 54.549.999,-* dengan total belanja sebesar *Rp. 193.665.999,-* dengan tingkat pencapaian sebesar *92,22 %*.
- Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Dalam kegiatan ini terdapat anggaran sebesar *Rp. 385.692.000,-* dengan rincian sebagai berikut belanja pegawai sebesar *Rp. 64.742.750,-* belanja barang dan jasa sebesar *Rp. 249.885.108,-* belanja modal sebesar *Rp. 47.900.180,-* sehingga total belanja dalam kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 362.528.038,-* jika diukur dengan persentase sebesar *93,99 %*.
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam program ini terdapat satu (1) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika dengan anggaran sebesar *Rp. 109.076.000,-* adapun rincian penggunaan anggaran ini adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar *Rp. 3.198.100,-* belanja barang dan jasa sebesar *Rp. 67.860.000,-* belanja modal sebesar *Rp. 25.080.000* sehingga total belanja dalam kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 96.138.100,-* jika diukur dengan persentase adalah sebesar *88,14 %*

2.3 Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dan Realisasi Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi 2017
			2017	2021		
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi Jaringan Internet	60	97	Diskominfo	

2.4 Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mengusung satu Program Prioritas yang tergambar dalam RPJMD Kabupaten Berau yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa**. Untuk program tersebut di atas indikator Kinerjanya adalah Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi internet, berdasarkan data yang kami himpun dari 13 Kecamatan ada 114 desa/kelurahan/ Kampung, yang blank spot ada 25 kampung sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama Kampung	Keterangan
1	Batu Putih	1. Ampeng Medang	Blank Spot
		2. Balik Kukup	Blank Spot
		3. Batu Putih	Blank Spot
		4. Kayu Indah	Blank Spot
		5. Kobang Kelatak	Blank Spot
		6. Sumber Agung	Blank Spot
		7. Tembudan	Blank Spot
2	Biatan	1. Biatan BApinang	Blank Spot
		2. Biatan BAru	Blank Spot
		3. Biatan Ilir	Blank Spot
		4. Biatan Lempake	Blank Spot
		5. Biatan Ulu	Blank Spot
		6. Bukit Makmur Jaya	Blank Spot
		7. Karang	Blank Spot
		8. Manunggal Jaya	Blank Spot

3	Biduk-Biduk	1. Biduk-biduk	Blank Spot
		2. Giring-giring	Blank Spot
		3. Pantai Harapan	Blank Spot
		4. Tanjung Perepat	Blank Spot
		5. Teluk Sulaiman	Blank Spot
		6. Teluk Sumbang	Blank Spot
4	Tabalar	1. Buyung-Buyung	Blank Spot
		2. Semurut	Blank Spot
		3. Tabalar Ulu	Blank Spot
5	Maratua	1. Maratua (Payung-payung)	Blank Spot

Jadi jika di prosentasekan dari keseluruhan jumlah kampung yang ada kampung yang masih blank spot adalah = $25/114 \times 100 \% = 21,93 \%$.

Dalam program prioritas ini untuk tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp. 902.145.000 (Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), ada pun untuk realisasi anggaran untuk program diatas terserap sebesar Rp. 847.888.495. jika di ukur dengan nilai persentase adalah sebesar 93,99 %. Hal ini tergambar pada laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan pertanggal 31 Desember 2017. Didalam program ini terdapat tiga kegiatan :

1. *Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi*
2. *Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Internet*
3. *Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan bidang Persandian.*

Untuk tahun 2017 anggaran yang tersedia dalam program prioritas di akui belum memenuhi sasaran hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau masih fokus terhadap pemenuhan akan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan internet yang masih terfokus di sekitaran ibukota Kabupaten Tanjung Redeb dan pemenuhan terhadap kebutuhan OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Hal lain juga yang mempengaruhi terhadap target Program prioritas tersebut adalah masih sangat tergantungnya jaringan kita terhadap pihak lain dalam hal ini adalah PT. Telkom Indonesia dan Penyedia Provider jaringan telekomunikasi seperti PT. Telkomsel, PT. Indosat dan PT. XL.Tbk.

2.5 Permasalahan dan Solusi

a. Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

➤ Permasalahan

Sejak keluarnya Undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah hanya ada dua yaitu :Pengelolaan informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain lingkup pemerintah daerah. Berkaitan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau untuk urusan komunikasi dan informasiterdapat (Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa) indikator kinerjanya adalah Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi jaringan internet dengan target kinerja untuk tahun 2017 adalah 60 Kampung, merujuk pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut maka otomatis kewenangan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur komunikasi dan informasi sampai kekampung-kampung bukan kewenangan pemerintah daerah lagi. Hal ini menjadi hambatan dalam mengentaskan program prioritas kepala daerah yang tergambar dalam RPJMD.

Demikian juga dengan letak geografis Kabupaten Berau yang sangat luas terdiri dari 13 kecamatan, 100 Kampung dan 10 Kelurahan sehingga jangkauan internet yang sampai kekampung-kampung belum maksimal sehingga banyak terdapat daerah-daerah yang blankspot. Demikian juga dengan anggaran yang masih sangat minim dalam menunjang Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada program Peningkatan sarana dan Prasarana terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan, permasalahan yang dihadapi dari kegiatan ini adalah jarak tempuh objek yang cukup jauh dari ibukota kabupaten yang terkait dengan pemeliharaan peralatan dan jaringan yang berada dikampung merasa kecamatan Kelay. Dalam kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung kelancaran operasional tower di kampung Marasa harus menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) untuk genset yang menunjang beroperasinya setiap hari. Mobiltas bahan Bakar Minyak inilah yang di anggap agak sulit karena jumlah liter bahan bakar minyak yang di pesan dari stasiun pengisian bahan bakar harus memenuhi jumlah tertentu baru bias di antarkan.

➤ **Solusi**

Beberapa solusi yang coba di tempuh untuk memenuhi permasalahan yang timbul dari kegiatan tersebut adalah dengan menghimbau agar kiranya pihak swasta yang beroperasi disekitar kampung merasa agar kiranya dapat ambil andil dalam memenuhi permasalahan yang dihadapi.

b. Program Prioritas berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

➤ **Permasalahan**

Program Prioritas yang berdasarkan RPJMD kabupaten Berau yang berkaitan dengan Komunikasi dan nformasi adalah Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa. Permasalahan yang timbul dari program ini adalah masih terdapatnya beberapa jumlah kampung yang belum terkoneksi jaringan telekomunikasi. Sementara saat ini system pelaporan keuangan dana Desa sudah menerapkan pelaporan menggunakan system yang harus didukung media telekomunikasi berupa jaringan internet.

➤ **Solusi**

Untuk solusinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau telah berusaha membuatkan usulan baik itu ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun Pmemerintah Pusat untuk dapat kiranya di beberapa daerah yang blank spot dapat di tabah pembangunan Tower dan hal ini mendapat respon yang positif dari pemerintah Provinsi ataupun pemerintah Pusat dengan akan dibangunnya 11 Tower mini (sebagai penguat sinyal di daerah-daerah yang telah ditentukan titik koordinatnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Berau untuk tahun 2017 belum ada melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat baik itu dari kementian maupun dari lembaga lainnya sehingga tidak tergambar dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Antar Daerah (MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan ***nomor surat Nomor :59.2/22-PRJJ/BKPWPDT/2017***

Nomor :52/NK/BPPT-PEMKAB.Berau/08/2017.

Kebijakan ini diambil karna dianggap BPPT pusat adalah lembaga yang selama ini telah melakukan riset dan penelitian dibidang teknologi yang sangat membantu pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang di anggap strategis untuk dapat memenuhi tarap hidup masyarakat yang lebih baik lagi.

Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPT pusat ini adalah ditelitinya air asin yang ada di kepulauan maratua yang kedepannya 17amp di suling menjadi air tawar, mengingat di kepulauan maratua kebutuhan air tawar sangat mendesak bagi kehidupan masyarakat di kepulauan tersebut.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Terkait dengan relisasi pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2017 belum ada realisasi dari kegiatan MoU tersebut, hal ini terbentur dengan ketersediaan anggaran yang belum memadai yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Harapan kedepannya dengan adanya MoU tersebut agar kiranya Pemerintah Kabupaten dalam hal ini OPD yang ingin melaksanakan kerjasama dengan pihak BPPT dapat melakukan kerjasama dengan bernaung pada Mou yang telah di sepakati antara Pemerintah Kabupaten Berau denagn BPPT.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul adalah turunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Berau pada Tahun 2017 dari tahun-tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap 18amper kesemua lini program dan kegiatan yang ada di OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Berau tidak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika. Demikian juga dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas untuk melkukan riset dan penelitian.

Adapun solusi yang di anggap dapat menutupi permasalahan di atas agar kiranya untuk kedepannya pihak BPPT pusat dapat menganggarkan setiap program dan kegiatan yang mereka usung yang sumber dananya sebaiknya dari APBN, mengingat jumlah dana untuk melakukan Penelitian dan Riset tidaklah sedikit dan ruang lingkup kerja BPPT ini sangat lah luas.

4.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (MoU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan pihak Ketiga) yang berlaku sampai dengan Tahun 2017 :

Untuk tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau belum ada melaksanakan kerjasama yang dimaksud tersebut.

4.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 belum ada melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal, hal ini berkaitan karna Dikominfo Kabupaten Berau baru terbentuk apada tahun 2017.

BAB V

PENGHARGAAN

Penghargaan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional serta Lembaga Lain.

Mengingat tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau baru terbentuk sehingga belum ada penghargaan baik itu tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

NIHIL

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dijelaskan beberapa hal dari beberapa BAB diatas maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika baru Terbentuk di tahun 2017 maka untuk data-data yang diminta oleh TIM penyusunan LKPJ Kabupaten Berau belum dapat kami penuhi seluruhnya hal ini terkait dengan data 2016 untuk urusan Komunikasi dan Informatika masih tergambar dan melekat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Untuk data DPA 2016 belum dapat di sajikan karena program dan kegiatan di tahun 2016 masih terbagi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi yang melekat pada Sekretariat Daerah Kab. Berau.
3. Pada BAB III terdapat urusan tugas pembantuan, hal ini juga belum terlaksana karena pada tahun 2016/2017 belum ada urusan tugas pembantuan yang di amanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

5.2. Saran

Sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2018 ada beberapa saran yang dapat kami himpun sesuai dengan kondisi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai berikut :

- a) Untuk menunjang Urusan yang di amanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar kiranya anggaran yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditingkatkan mengingat urusan dan tugas fungsi OPD ini cukup luas yang terdiri dari tiga urusan yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

b) Mengingat LKPJ OPD adalah sumber data untuk menyusun LKPJ Kabupaten Berau agar Kiranya Tim penyusun LKPJ Kabupaten dapat memberi ruang waktu yang cukup mengingat di awal tahun hampir seluruh laporan dikerjakan hampir bersamaan sehingga dengan waktu yang cukup kami dari OPD dapat menyiapkan data yang lebih akurat dan teliti.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

Drs. SUSILA HARJAKA

Pembina Utama Muda / IVc

Nip. 19620526198803 1 006